

## **ANALISIS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN SMK DI KOTA SEMARANG**

**Totok Sumaryanto, Sunyoto, Margunani  
Universitas Negeri Semarang**

### **Abstract**

*This study aims to analyze the financing of education, in particular financing vocational schools (SMK) in Semarang. This research is descriptive and population is entire vocational schools in the city of Semarang. Samples were taken by purposive, involving 16 SMK, comprising 10 public school and 6 private school. Collecting data using questionnaires, interviews, and documentation. Data were analyzed by descriptive-qualitative. Conclusion of the study: 1) The amount of expenditure per year in public vocational school is higher than private expenditure, which is an average of Rp 6.197.347.599 compared to Rp 1.602.757.428, 2) Personal costs directly related components teaching and learning process for private vocational school is greater than the public vocational school (Rp 4.167.000 compared to Rp 1.874.000), 3) BOS (School Operational Funds) for vocational in Semarang Rp 1.780.000 contribute to the direct personnel costs amounted to 94.98% for public vocational school and 42.71% for private vocational school, 4) Based budgets (public vocational school) the average cost per student per year excluding the cost of the investment is Rp 2.027.167 or Rp 168.931 per month so that the BOS funds accounted for 87.80%, 5) Compared to nonpersonnel standard operating costs pursuant Permendiknas Number 69/2009, the BOS funds in Semarang for Non-Technical Vocational already more than provisions (107.47%), while for Vocational Technical still under provisions, namely for Automotive Engineering Program 93.66% and for Machinery Engineering Program 82, 99%.*

**Keywords: cost analysis, vocational school, Semarang**

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan menganalisis pembiayaan pendidikan, khususnya pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan populasi seluruh SMK di Kota Semarang. Sampel penelitian diambil secara purposive, terdiri dari 10 SMK negeri dan 6 SMK swasta. Pengumpulan data menggunakan metode angket, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Kesimpulan penelitian antara lain: 1) Besarnya biaya pengeluaran SMK negeri pertahun lebih tinggi daripada pengeluaran SMK swasta, yaitu rata-rata Rp 6.197.347.599,- banding Rp 1.602.757.428,- 2) Biaya Personal Komponen Langsung terkait proses belajar mengajar untuk SMK swasta lebih besar daripada SMK negeri (Rp4.167.000,- banding Rp1.874.000,-), 3) Dana BOS untuk SMK di Kota Semarang Rp1.780.000,- memberikan kontribusi terhadap Biaya Personal Langsung siswa SMK negeri sebesar 94,98% dan untuk SMK swasta 42,71%, 4) Berdasarkan RAPBS (SMK negeri), biaya rata-rata persiswa pertahun tidak termasuk Biaya Investasi adalah Rp2.027.167,- atau Rp168.931,- perbulan sehingga dana BOS memberikan kontribusi sebesar 87,80%, 5) Jika dibandingkan Standar Biaya Operasi Nonpersonalia sesuai ketentuan Permendiknas No. 69 tahun 2009, maka dana BOS di Kota Semarang untuk SMK non teknik sudah lebih dari ketentuan (107,47%), sementara untuk SMK teknik masih di bawah ketentuan, yaitu untuk program Teknik Mekanik Otomotif 93,66% dan untuk program Teknik Permesinan 82,99%.*

**Kata kunci: analisis biaya, SMK, Kota Semarang**

## **Pendahuluan**

Kemajuan suatu bangsa bukan ditentukan oleh kekayaan sumber daya alamnya namun lebih ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut, pembangunan bidang pendidikan memegang peranan sentral. Agar output dari proses pendidikan meningkat, mempunyai daya saing tinggi, serta mampu menjawab tantangan global, pemerintah telah mengembangkan standar nasional pendidikan.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi 8 (delapan) standar, yaitu: Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan.

pembiayaan untuk jenjang sekolah menengah kejuruan atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dalam PP RI No. 32 Tahun 2013 ps. 1 ayat (11) disebutkan, Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Selanjutnya dalam ayat (15) dinyatakan, biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

Seperti terlihat pada Gambar 1, pembiayaan pendidikan meliputi biaya pengelolaan pendidikan (investasi), biaya di satuan pendidikan (operasional), dan biaya pribadi peserta didik (personal). Khusus biaya operasional dibedakan dua, yaitu Biaya Operasi Personal, antara lain untuk membayar gaji guru dan tenaga kependidikan, dan Biaya Operasi Non Personal, antara lain untuk membayar gaji guru dan tenaga kependidikan, dan Biaya Operasi Non Personal.

Terkait Biaya Operasi Non



**Gambar 1**  
**Skema Pembiayaan Pendidikan Menengah**

Di antara delapan standar pendidikan, kajian tentang standar pembiayaan masih jarang dilakukan, padahal antara standar satu dengan yang lain sama-sama penting dan saling terkait. Oleh karena itu kajian tentang standar pembiayaan penting untuk dilakukan, salah satunya adalah standar

Personal, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonal Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB. Dalam lampiran Permendiknas tersebut telah disebutkan

tentang besarnya Biaya Operasi Non Personalia. Biaya Operasi Non Personalia meliputi: biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan.

Sebagaimana skema pada Gambar 1, Biaya Operasi Non Personalia ini merupakan sasaran dari Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun, sebagai konsekuensi dari kebijakan wajib belajar 9 tahun.

Seiring dengan dinamika pembangunan, sejak tahun 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah merintis adanya BOS untuk pendidikan menengah (SMA/SMK) sebagai persiapan "Wajib Belajar 12 Tahun". Pada tahun 2020, Kemendikbud menargetkan semua warga Indonesia berpendidikan minimal SMA/SMK. Rencananya, tahun 2020 itu APK (Angka Partisipasi Kasar) sekolah menengah 97 persen, sekarang baru mencapai 78 persen (M. Nuh, 2012).

Pemerintah Kota Semarang mulai tahun 2013 juga telah memberikan BOS bagi siswa sekolah menengah, yang besarnya Rp960.000,- pertahun untuk SMA dan Rp1.780.000,- pertahun untuk SMK. Komitmen Pemerintah Kota Semarang ini perlu disambut baik karena belum semua daerah mampu memberikan BOS. Besarnya dana BOS yang diberikan Pemerintah Kota Semarang sebetulnya juga telah sesuai dengan ketentuan Permendiknas No. 69

Tahun 2009. Sebagaimana disebutkan dalam lampiran Permendikas, dana operasional non personalia untuk SMK lebih besar daripada SMA. Untuk SMA IPS Rp960.000,- dan SMA IPA Rp1.010.000,-. Untuk SMK bervariasi bergantung pada program keahliannya. Sebagai gambaran, program keahlian Bisnis dan Manajemen Rp1.830.000,-, program keahlian Teknik Otomotif Rp2.040.000,-, dan program keahlian Teknik Mesin Rp2.370.000,-. Harga tersebut didasarkan pada DKI Jakarta, dan untuk Kota Semarang dikalikan indeks yang besarnya 0,905.

Mengingat besarnya Biaya Operasional Non Personalia sebagai alokasi dana BOS tersebut telah ditetapkan sejak tahun 2009 (sudah 5 tahun berjalan), maka dipandang perlu untuk menyesuaikan dengan inflasi atau kenaikan harga-harga produk barang dan jasa saat ini. Atas dasar pertimbangan inilah dilakukanlah penelitian ini guna mengetahui seberapa besar Biaya Operasional Non Personalia bagi SMK di Kota Semarang. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi Pemerintah Kota Semarang sebagai bahan pertimbangan dalam mengalokasikan dana BOS, khususnya bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Dalam konsep dasar pembiayaan pendidikan ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya satuan per siswa (*unit cost*). Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan jumlah total (*aggregate*) biaya pendidikan tingkat sekolah baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan per murid merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan. Oleh karena biaya satuan ini diperoleh dengan

memperhitungkan jumlah murid pada masing-masing sekolah, maka ukuran biaya satuan dianggap standar dan dapat dibandingkan antara sekolah yang satu dengan yang lainnya.

Menurut Bastian (2007) untuk memecahkan permasalahan perhitungan biaya sekolah dasar dan menengah adalah dengan pendekatan tradisional dan pendekatan *Activity Costing System* (ACS) atau juga dikenal *Activity Based Costing* (ABC). Proses dan sistematika pemecahannya adalah melalui rincian: 1) pemahaman mengenai pengertian biaya, 2) klasifikasi dan identifikasi biaya-biaya yang terjadi di sekolah ke dalam kategori tertentu dengan pendekatan ACS, 3) pembuatan konsep perhitungan biaya baru yang akurat dan informatif, dan 4) simulasi aplikasi model perhitungan biaya. Setelah diketahui biaya menurut sifatnya, identifikasi biaya yang terjadi di sekolah disesuaikan dengan APBS. Bastian (2007) memaparkan bahwa komponen anggaran terdiri dari berbagai aktivitas yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Dari berbagai aktivitas tersebut, biaya pelaksanaannya terdiri dari dua komponen, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Untuk menyusun laporan biaya aktivitas digunakan analisis *Activity Costing System* (ACS).

Dalam menghitung biaya operasional pendidikan, idealnya pengelola sekolah dan guru memiliki kemampuan menghitung biaya operasionalnya masing-masing yang mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan secara optimal. Guru sebagai pengelola pendidikan di kelas, harus mampu menghitung biaya yang diperlukan dalam proses belajar mengajar untuk menghasilkan perubahan perilaku anak didik sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Sedangkan pengelola sekolah harus mampu menghitung biaya operasional secara keseluruhan dalam memberikan

pelayanan pendidikan, sehingga sumber daya yang dikonsumsi selalu didasarkan pada aktivitas yang seharusnya dilakukan untuk menghasilkan pelayanan pendidikan yang dapat dinikmati siswa/*stakeholder*. Oleh karena itu, dalam panduan ini, perhitungan biaya layanan pendidikan didasarkan pada sistem Pembiayaan Berbasis Aktivitas (*Activity Based Costing System*). Keunggulan cara ABC dalam layanan pendidikan ini adalah memotivasi pengelola sekolah dan guru melakukan perubahan perilaku dan budaya terhadap aktivitas yang dilakukan, sebagai strategi efisiensi melalui *cost reduction* (Swabina.wordpress.com, 2012).

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama menggambarkan dan menginterpretasikan obyek sesuai dengan apa adanya. Tahapan penelitian meliputi: (1) penyusunan rencana penelitian, (2) penyusunan instrumen penelitian, (3) pengumpulan data, (4) pengorganisasian hasil pengumpulan data, (5) analisis dan perumusan hasil pengumpulan data, (6) penyusunan laporan, (7) seminar hasil, dan (8) penulisan laporan akhir dan rekomendasi.

Populasi penelitian adalah *stageholder* (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa) SMK di Kota Semarang, baik SMK negeri maupun swasta. Di Semarang terdapat 88 SMK (11 negeri dan 77 swasta). Dari 88 SMK terdapat 273 program keahlian, 18 terakreditasi A, 32 terakreditasi B, dan 223 masih terakreditasi C. Sampel penelitian diambil secara *purposive* dengan melibatkan *stakeholder* dari 16 SMK, terdiri 10 SMK negeri dan 6 SMK swasta.

Pengumpulan data menggunakan berbagai metode dimana antara metode yang satu dengan yang lain saling melengkapi, sehingga data yang diperoleh semakin lengkap dan valid. Kuesioner atau angket, dilakukan untuk mengumpulkan data utama yang diperoleh dari nara sumber primer. Wawancara, dilakukan untuk menjangkau data-data dari nara sumber primer, sekaligus untuk melengkapi data yang diperoleh dengan metode angket. Pengambilan data ini melalui metode *FGD* (*Focus Group Discussion*). Dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari data statistik, dokumen, serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Sesuai dengan karakteristik penelitian yang dilakukan, data yang dihasilkan dari kuesioner dianalisis menggunakan teknik analisis statistik deskriptif untuk melihat kecenderungan-kecenderungan serta hubungan atau relevansi yang terjadi. Sedangkan data yang bersifat kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumen dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif model interaktif yang secara simultan terdiri dari tahapan: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan kesimpulan/verifikasi.

Data penelitian tentang penentuan satuan biaya pendidikan yang diperoleh dari dokumen (RAPBS) digunakan rumus:

$$S_b(s,t) = f [K(s,t) : M(s,t)] \quad (\text{Prakosa, 2010}).$$

Keterangan:  $S_b$ : satuan biaya murid per tahun;  $K$ : jumlah seluruh pengeluaran;  $M$ : jumlah murid;  $s$ : sekolah tertentu,  $t$ : tahun tertentu

### Hasil Penelitian

Data penelitian telah diperoleh dari *stakeholder* (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite sekolah, kepala tata usaha atau bendahara harian, guru dan siswa) yang berasal dari 14 SMK di

Kota Semarang, terdiri dari 8 SMK negeri dan 6 SMK swasta. SMK negeri meliputi: SMK Negeri 1, SMK Negeri 3, SMK Negeri 4, SMK Negeri 5, SMK Negeri 6, SMK Negeri 7, SMK Negeri 9, SMK Negeri 10. SMK swasta meliputi: SMK Pelita Nusantara 1, SMK Ibu Kartini, SMK Teuku Umar, SMK Muhammadiyah 2, SMK IPT, dan SMK Nurul Baqri. Khusus data dokumen berasal dari 10 SMK negeri di Kota Semarang.

Data pengeluaran pembiayaan pendidikan dilakukan dengan memberikan isian angket terhadap kepala sekolah dan siswa. Komponen biaya pengeluaran yang diungkap dari angket antara lain Biaya Investasi, Biaya Operasi Personalia, Biaya Operasi Non Personalia, Dan Biaya Personal. Total pengeluaran adalah jumlah seluruh pengeluaran tersebut seperti disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Rata-Rata Biaya Pendidikan SMK**  
**pada tahun 2013-2014**

Komponen Penganggaran	SMK Negeri (Rp)	SMK Swasta (Rp)
Biaya Investasi	766.247.250	207.344.867
Biaya Operasi Personalia	4.130.364.099	466.820.096
Biaya operasi pendidikan langsung non personalia	1.154.816.250	314.979.040
Biaya personal	145.920.000	613.613.425
<b>Total</b>	<b>6.197.347.599</b>	<b>1.602.757.428</b>

Untuk Biaya Personal dengan sumber data siswa dapat dibedakan dua jenis, yaitu biaya personal langsung dan tidak langsung. Biaya Personal Langsung adalah yang terkait dengan proses belajar-mengajar (biaya operasi non personalia), sedangkan Biaya Personal Tidak Langsung adalah biaya yang tidak terkait dengan PBM, misalnya uang saku, uang jajan, uang transport, biaya seragam sekolah dan lain-lain. Perincian uang personal disajikan pada Tabel 2.

Dari Tabel 1 dan Tabel 2, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata

pengeluaran sekolah di SMK negeri lebih tinggi daripada pengeluaran sekolah di SMK swasta. Namun demikian, rata-rata biaya personal dan biaya personal komponen langsung pembelajaran siswa SMK negeri lebih kecil daripada SMK swasta.

**Tabel 2**  
**Rata-Rata Biaya Personal Siswa SMK**  
**pada tahun 2013-2014**

Komponen Penganggaran	SMK Negeri (Rp)	SMK Swasta (Rp)
Biaya komponen langsung untuk pembelajaran	1.874.000	4.167.000
Biaya Tidak Langsung Terhadap PBM	6.236.000	5.143.000
<b>Total</b>	<b>8.110.000</b>	<b>9.310.000</b>

ditanggung siswa jika semua biaya dibebankan kepada siswa. Belanja Langsung meliputi Belanja Pegawai (PNS, GTT/PTT), Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa biaya rata-rata persiswa pertahun adalah Rp2.999.550,- atau Rp249.963,- perbulan. Jika Biaya Langsung tanpa memperhitungkan biaya modal atau investasi, maka biaya rata-rata persiswa pertahun adalah Rp2.027.167,- atau Rp168.931,- perbulan. Apabila dibandingkan dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Semarang untuk SMK sebesar Rp1.780.000,- persiswa pertahun, atau Rp148.333,- persiswa perbulan, maka BOS yang diberikan Pemerintah Kota Semarang besarnya adalah 87,80% dari

**Tabel 3**  
**Analisis Biaya SMK Negeri Tahun 2012-2014**

NO	URAIAN SEKOLAH	JML SISWA		Belanja Pegawai PNS		Belanja Pegawai GTT/PTT		Belanja Barang Dan Jasa		Belanja Modal		
		2012 - 2013	2013-2014	2012 - 2013	2013-2014	2012 - 2013	2013-2014	2012 - 2013	2013-2014	2012 - 2013	2013-2014	
1	SMK 1	1.428	1.508	892.045.800	298.180.000	54.500.000	573.340.000	2.393.043.200	1.501.364.052	902.700.000	2.606.578.650	
2	SMK 2	1.308	1.259	250.789.500	256.975.900	276.460.000	608.820.000	2.323.025.300	3.063.507.532	704.143.000	885.420.500	
3	SMK 3	1.077	1.153	270.204.500	301.201.000	571.103.200	535.800.000	1.237.483.100	2.099.098.000	517.100.000	5.126.300.000	
4	SMK 4	1.638	1.748	56.520.000	89.710.800	442.800.000	849.381.500	1.068.491.100	1.682.422.695	850.500.000	1.785.000.000	
5	SMK 5	1.298	0	28.281.000		408.000.000		362.928.550		95.500.000		
6	SMK 6	1.091	0	375.989.900		64.338.000		1.804.445.203		313.987.500		
7	SMK 7	0	0									
8	SMK 8	1.111	1.116	74.193.700	117.750.000	149.640.000	555.030.000	1.052.248.032	1.748.156.000	475.999.996	597.396.000	
9	SMK 9	972	1.006	602.830.000	161.970.000	174.780.000	291.000.000	2.709.129.807	1.848.286.500	396.000.026	846.857.600	
10	SMK 10	1.217	1.223	475.820.010	126.300.000	408.000.000	512.860.000	1.469.110.005	2.107.182.000	530.440.000	1.605.600.000	
11	SMK 11	1.538	1.541	436.962.500	418.400.000	958.305.000	864.000.000	2.458.796.500	2.634.147.000	3.723.380.000	627.500.000	
Jumlah:		12.678	10.554	3.463.636.910	1.770.487.700	3.507.926.200	4.790.231.500	16.878.700.797	16.684.163.779	8.509.750.522	14.080.652.750	
Jumlah siswa SMK		23.232										
Jumlah Biaya Langsung SMK Negeri Kota Semarang						2012-2013 =	23.850.263.907	2013-2014 =	23.244.882.979	2012-2014 =	47.095.146.886	
Jumlah seluruh komponen Biaya Langsung dan Investasi						2012-2013 =	32.360.014.429	2013-2014 =	37.325.535.729	2012-2014 =	69.685.550.158	
1	Seluruh Belanja Langsung (B. Pegawai dan B. Barang - Jasa) dan Investasi per tahun per siswa						Rp		2.999.550			
2	Seluruh Belanja Langsung (B. Pegawai dan B. Barang - Jasa) dan Investasi per bulan per siswa						Rp		249.963			
3	Biaya Langsung (Belanja Pegawai dan Belanja Barang - Jasa) per tahun per siswa						Rp		2.027.167			
4	Biaya Langsung (Belanja Pegawai dan Belanja Barang - Jasa) per bulan per siswa						Rp		168.931			
						Dana BOS SMK per tahun		Rp		1.780.000		
						Dana BOS SMK per bulan		Rp		148.333		

Selain data dari angket, dalam penelitian ini juga menggunakan data dokumen dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) SMK negeri Tahun 2012-2014. Total Belanja Langsung dibagi jumlah siswa menunjukkan biaya yang harus

Biaya Langsung komponen Belanja Pegawai dan Belanja Barang & Jasa.

### Pembahasan

Biaya pendidikan meliputi biaya pengelolaan pendidikan (investasi), biaya operasional, dan biaya pribadi peserta

didik. Biaya operasional meliputi Biaya Operasi Personalia (gaji dan tunjangan guru dan tenaga kependidikan) dan Biaya Operasi Non Personalia, antara lain meliputi ATK, daya dan jasa, pembinaan siswa, bahan habis pakai, dll.

Secara umum total seluruh anggaran SMK negeri lebih besar daripada SMK swasta. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain komponen biaya utama untuk gaji pegawai yang notabene umumnya PNS berdasarkan standar pemerintah, sarana dan prasarana pendidikan yang lebih banyak dan lebih lengkap sehingga membutuhkan biaya operasional lebih tinggi, serta aktivitas kegiatan belajar-mengajar yang lebih banyak. Selain itu sumber biaya pendidikan SMK negeri sebagian besar berasal dari pemerintah (APBN/APBD) yang telah mempunyai standar/aturan tertentu. Sementara sumber biaya pendidikan di SMK swasta sebagian besar berasal dari masyarakat atau siswa, sehingga pihak sekolah harus dapat lebih “menghemat”.

Namun untuk komponen Biaya Personal, SMK swasta lebih tinggi (rata-rata Rp613.613.425,-) sementara untuk SMK negeri rata-rata Rp145.920.000,- pertahun (Lihat Tabel 4.1) Hal ini linier dengan biaya personal dengan sumber data siswa (Tabel 4.2) untuk komponen langsung, dimana untuk SMK Swasta juga lebih besar (Rp4.167.000,-) sementara untuk SMK Negeri Rp1.874.000,-.

Jika dibandingkan dengan dana BOS Kota Semarang untuk SMK yang besarnya Rp1.780.000 pertahun, persentase BOS terhadap Biaya Operasional Langsung siswa SMK negeri adalah 94,98% sementara untuk SMK swasta lebih kecil yaitu 42,71%.

Sementara untuk Biaya Personal Tidak Langsung (biaya pribadi), seperti untuk uang transport, uang saku/uang jajan, uang les/kursus, dsb., biaya pribadi siswa SMK negeri lebih besar yaitu rata-rata Rp6.236.000,- pertahun atau Rp519.666,- perbulan

dan SMK swasta rata-rata Rp5.143.000,- pertahun atau Rp428.583,- perbulan. Namun dana BOS tidak diperuntukkan untuk biaya pribadi. Alokasi dana pribadi/personal tidak langsung PBM dicover oleh dana BSM (Bantuan Siswa Miskin).

Berdasarkan data RAPBS dari SMK negeri, dapat diketahui rata-rata biaya yang harus ditanggung siswa untuk seluruh biaya pendidikan (investasi, operasional personalia maupun non personalia). Jika dihitung biaya rata-rata persiswa pertahun adalah Rp2.999.550,- atau Rp249.963,- perbulan. Jika dibandingkan dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Semarang untuk SMK sebesar Rp1.780.000,- persiswa pertahun, atau Rp148.333 persiswa perbulan, maka BOS yang diberikan pemerintah Kota Semarang sebesar 59,34%. Namun perlu diketahui bahwa BOS hanya dipergunakan untuk biaya Operasi Non Personalia, atau tidak boleh untuk Biaya Investasi. Jika didasarkan pada Belanja Pegawai (selain gaji PNS) dan Belanja Barang & Jasa, maka dana BOS memberikan kontribusi sebesar 87,80%.

Berdasarkan Permendiknas No. 69 Th. 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia dibedakan menurut bidang/program keahliannya, dan mengacu pada standar di DKI Jakarta. Untuk Kota Semarang, standar yang ada dikalikan indeks yang besarnya 0,905. Besarnya Biaya Operasi Nonpersonalia untuk SMK non teknik berkisar antara Rp1.830.000,- s/d Rp2.150.000,- bergantung pada bidang/program keahliannya. Sebagai gambaran, bidang Bisnis dan Manajemen besarnya Biaya Operasi Nonpersonalia Rp1.830.000,- (Kota Semarang Rp1.656.150,-). Sementara untuk SMK teknik besarnya Biaya Operasi Nonpersonalia lebih tinggi, berkisar antara Rp2.100.000,- s/d Rp2.510.000,- Sebagai gambaran program Teknik Mekanik Otomotif sebesar Rp 2.100.000,- dan program

Teknik Permesinan Rp2.370.000,- atau untuk Kota Semarang besarnya Rp1.900.500,- dan Rp2.144.850,-.

Jika dibandingkan dengan dana BOS Kota Semarang yang besarnya Rp1.780.000,- (berasal dari dana BOS Pusat Rp1.000.000,- dan Pendamping BOS Kota Semarang Rp780.000,-), maka untuk SMK non teknik sudah lebih dari ketentuan Permendiknas No. 69 tahun 2009 yang besarnya Rp1.656.150,- atau sudah 107,47%.

Sementara untuk SMK teknik, besarnya dana BOS Kota Semarang masih di bawah ketentuan Permendiknas No. 69 tahun 2009, yaitu untuk program Teknik Mekanik Otomotif Rp1.780.000,- dari standar Rp1.900.500,- atau 93,66% dan untuk program Teknik Permesinan Rp1.780.000,- dari standar Rp2.144.850,- atau 82,99%.

Standar yang dikeluarkan pemerintah telah berlaku sejak tahun 2009, sehingga dalam implementasinya perlu mempertimbangkan inflasi. Besarnya inflasi di Indonesia rata-rata pertahun sebesar 8,5% (<http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/inflasi-di-indonesia/item254>). Jadi besarnya standar Biaya Operasi Nonpersonalia harusnya mempertimbangkan besarnya inflasi 8,5% pertahun. Misalnya standar tahun 2009 adalah Rp1.656.150,- (SMK non teknik Kota Semarang), Rp1.900.500,- dan Rp2.144.850,- (SMK teknik Kota Semarang), maka untuk tahun 2013/2014 (setelah 3 tahun) harusnya menjadi Rp2.078.469,- (SMK non teknik Kota Semarang), Rp2.385.129,- dan Rp2.691.789,- (SMK teknik Kota Semarang). Persentase dana BOS Kota Semarang atas dasar Standar Biaya Nonpersonalia yang telah memperhitungkan inflasi menjadi 85,64% (SMK non teknik Kota Semarang), 74,63% dan 66,12% (SMK teknik Kota Semarang),

Hasil penelitian yang didasarkan data RAPBS tersebut dapat memberikan gambaran seberapa besar dana BOS jika dibandingkan dengan kebutuhan biaya pendidikan di SMK. Secara umum dana BOS masih lebih kecil dari kebutuhan. Demikian juga jika dibandingkan dengan standar biaya sesuai Permendiknas No. 69 tahun 2009, yang masih di bawah standar. Melalui analisis pembiayaan ini, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan dana BOS yang bersumber dari APBN maupun APBD (Pendamping BOS).

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Besarnya biaya pengeluaran SMK negeri lebih tinggi daripada pengeluaran SMK swasta, yaitu rata-rata Rp6.197.347.599,- banding Rp1.602.757.428,-
2. Total biaya personal siswa SMK negeri lebih kecil daripada SMK swasta, yaitu rata-rata Rp8.110.000,- banding Rp9.310.000,- namun jika diperinci terdapat perbedaan yang mencolok, yaitu untuk Biaya Personal Komponen Langsung terkait PBM untuk pembelajaran SMK swasta lebih besar daripada SMK negeri (Rp4.167.000,- banding Rp1.874.000,-). Sebaliknya, Biaya Personal Tidak Langsung SMK negeri lebih besar daripada SMK swasta (Rp6.236.000,- banding Rp5.143.000,-).
3. Persentase dana BOS untuk SMK di Kota Semarang Rp1.780.000,- terhadap Biaya Personal Langsung siswa SMK negeri adalah 94,98% dan untuk SMK swasta 42,71%.
4. Berdasarkan RAPBS (SMK negeri), biaya rata-rata persiswa pertahun termasuk Biaya Investasi adalah Rp2.999.550,- atau Rp249.963,- perbulan. Jika dibandingkan dengan



- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Semarang untuk SMK sebesar Rp1.780.000,- persiswa pertahun, atau Rp148.333,- persiswa perbulan, maka BOS yang diberikan Pemerintah Kota Semarang sebesar 59,34%.
5. Berdasarkan RAPBS (SMK negeri), biaya rata-rata persiswa pertahun tidak termasuk Biaya Investasi adalah Rp2.027.167,- atau Rp168.931,- perbulan. Jika dibandingkan dengan dana BOS di Kota Semarang untuk SMK sebesar Rp1.780.000,- persiswa pertahun, atau Rp148.333 persiswa perbulan, maka kontribusi dana BOS adalah sebesar 87,80%.
  6. Jika dibandingkan Standar Biaya Operasi Nonpersonalia sesuai ketentuan Permendiknas No. 69 tahun 2009, maka dana BOS Kota Semarang yang besarnya Rp1.780.000,- untuk SMK non teknik sudah lebih dari ketentuan yang besarnya Rp1.656.150,- atau sudah 107,47%.
  7. Sementara untuk SMK teknik, besarnya dana BOS Kota Semarang yang besarnya Rp1.780.000,- masih di bawah ketentuan Permendiknas No. 69 tahun 2009, yaitu untuk program Teknik Mekanik Otomotif Rp1.900.500,- atau 93,66% dan untuk program Teknik Permesinan Rp2.144.850,-, atau 82,99%.
  8. Apabila memperhitungkan inflasi sebesar 8,5% pertahun, maka untuk tahun 2013/2014 (setelah 3 tahun diberlakukannya Permendiknas No. 69 tahun 2009) besarnya biaya Operasi Nonpersonalia harusnya menjadi Rp2.078.469,- (SMK non teknik Kota Semarang), Rp2.385.129,- dan Rp2.691.789,- (SMK teknik Kota Semarang), sehingga persentase dana BOS Kota Semarang atas dasar Standar Biaya Operasi Nonpersonalia yang telah memperhitungkan inflasi menjadi

85,64% (SMK non teknik Kota Semarang), 74,63% dan 66,12% (SMK teknik Kota Semarang).

9. Persepsi *stakeholder* terhadap pemenuhan standar pembiayaan, implementasi kurikulum, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pengelolaan pelaksanaan pendidikan satuan pendidikan SMK di kota Semarang tahun 2013/2014 semuanya sama atau tidak terdapat perbedaan.

### Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan terkait hasil penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan oleh Pemerintah Kota Semarang, terkait pembiayaan pendidikan pada umumnya maupun di SMK pada khususnya, serta dapat dijadikan dasar dalam melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam dan lebih fokus tentang pembiayaan pendidikan di SMK, yaitu supaya pada salah satu komponen biaya pendidikan, misalnya tentang Biaya Operasi Non Personalialia, dimana komponen ini termasuk alokasi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
3. Dana BOS yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pendamping BOS dari Pemerintah Kota Semarang untuk siswa SMK supaya membedakan bidang atau program keahlian yang ada, paling tidak dibedakan antara SMK non teknik dan SMK teknik, baik untuk SMK negeri maupun SMK swasta, dimana untuk SMK teknik biaya operasionalnya lebih tinggi.
4. Selain memperhatikan bidang/program keahlian, dana BOS atau Pendamping BOS pada SMK untuk tahun-tahun mendatang perlu

- memperhatikan tingkat inflasi sehingga besanya dapat ditingkatkan.
5. Biaya personal langsung terkait proses belajar-mengajar (PBM) pada SMK swasta lebih besar daripada SMK negeri, maka pemerintah dapat lebih memperhatikan bantuan kepada SMK swasta melalui BSM (Bantuan Siswa Miskin) dimana sumber pembiayaan utama SMK swasta berasal dari siswa.
  6. Kepada pihak sekolah supaya lebih memperjelas penggunaan dana BOS yang bersumber dari pusat maupun dari Pemerintah Kota Semarang (pendamping BOS) untuk menghindari tumpang tindih pembiayaan atau kemungkinan penggunaan di luar ketentuan yang berlaku.
  7. Untuk mengetahui biaya ideal dalam penyelenggaraan pendidikan di SMK supaya didasarkan pada kebutuhan ideal pihak sekolah, dan hal ini juga memerlukan pemahaman dari seluruh *stakeholder* terkait/pihak sekolah tentang konsep sekolah ideal sehingga jawaban yang diberikan mempunyai landasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penelitian ini dapat telaksana dengan dukungan biaya dari APBD Kota Semarang tahun anggaran 2014 serta bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada: 1) Walikota Semarang beserta seluruh jajaran pimpinan dan staf, 2) Kepala Bappeda Kota Semarang beserta seluruh jajaran pimpinan dan staf, 3) Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang beserta seluruh jajaran pimpinan dan staf, 4) Kepala SMK negeri maupun swasta di Kota Semarang beserta segenap guru dan siswa di Kota Semarang, 5) Semua pihak yang terlibat dan membantu dalam kegiatan penelitian ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga.
- BSNP. 2006. *Standar Biaya Pendidikan Biaya Operasional SD*. Jakarta: BSNP
- Fattah, Nanang. 2007. *Analisis Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar*. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia
- \_\_\_\_\_. 2008. *Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori dan Studi Empiris*. *Jurnal Pendidikan Dasar*.(3).
- Hartono, dkk. 2011. *Pemetaan dan Pengembangan Kompetensi Siswa SMA Berbasis Ujian Nasional dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, dan Kota Semarang*. *Laporan Penelitian Pemetaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan (PM-PMP) kerjasama Ditlitabmas Dikti dengan Unnes*.
- Jakaria, Y. 2009. *Uji Coba Model (Validasi)*. Materi disampaikan dalam Pelatihan Penelitian dan Pengembangan *Research & Development* yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Badan Penelitian dan Pengembangan. Depdiknas di Jakarta.
- Kemendikbud. 2014. *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK*. Jakarta: Kemendikbud.
- Nurteti. 2008. *Analisis Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*. Blog Lilis Education and Social Issues. (Diakses tanggal 10 Maret 2014)

Prakosa, Ibnu. 2010. *Analisa Biaya Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar (Studi Kasus di Kabupaten Sragen)*. Tesis. Surakarta: Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB*

Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*.

.....2012. *Panduan Perhitungan Satuan Biaya Operasional Pendidikan*. [www.swabina.wordpress.com](http://www.swabina.wordpress.com). (Diakses tanggal 12 Maret 2014).

Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

